RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : Jum'at, 14 Agustus 2026

TENTANG

MENDENGARKAN
PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR
ATAS RANCANGAN UNDANG–UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2027 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

MENDENGARKAN
PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR
ATAS RANCANGAN UNDANG–UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2027 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Agustus 2026
Waktu : 14.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan,
2. Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **H. SULISTIYONO, AP.,MSi.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 7 orang
4. Fraksi Demokrat	: 8 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 8 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 6 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
4. Fraksi Demokrat	: 6 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 5 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 4 orang
Jumlah	: 28 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
4. Fraksi Demokrat	: 2 orang

5. Fraksi Nasdem Berkarya : 3 orang
6. Fraksi Hanura Amanah : 2 orang

Jumlah : 17 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang,

Yang terhormat

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat

- Rekan-rekan Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang kami hormati,

- Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Partai Politik, Universitas dan hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali acara marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang sidang paripurna untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia

dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden ini dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 31 Juli 2026 dan atas dasar Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-13/M/S/TU.00.03/08/2026 Hal : Pedoman Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.

Hari ini Jum'at tanggal 14 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Pramuka, untuk itu perkenankan saya pada kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Pramuka ke - 65 " JAYALAH PRAMUKA ", semoga Gerakan Pramuka Kabupaten Rembang semakin unggul di dalam membentuk generasi penerus bangsa yang tangguh, pantang menyerah, berakhlak dan berkarakter. Aamiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa rapat paripurna ini dihadiri secara fisik oleh anggota DPRD sebanyak 28 orang. Oleh karena rapat paripurna ini tidak mengambil keputusan, yang mana dalam pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan jumlah fisik anggota yang hadir, maka dengan mengucap "***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 14.47 WIB rapat paripurna dalam rangka **Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya**, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Hadirin rapat paripurna yang terhormat,

Dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa penyampaian pidato Presiden dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya ini merupakan agenda nasional tahunan dalam rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyampaian pidato kenegaraan ini telah menjadi sebuah konvensi dalam konstitusi. Pidato Kenegaraan merupakan bentuk komunikasi resmi dari seorang kepala Negara atau kepala pemerintahan dalam memberikan informasi mengenai kondisi Negara maupun beragam respon kebijaksanaan pemerintah terhadap isu-isu actual serta pencapaian dan arah pembangunan yang akan diambil pada masa mendatang. Mengingat pentingnya pidato kenegaraan ini, maka setiap tahun pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara menerbitkan surat edaran yang salah satu isinya berisi himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat unutk mengikuti siaran langsung Presiden Republik Indonesia.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD Kabupaten Rembang setiap tahun secara rutin menyelenggarakan rapat paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kami berharap agar agenda nasional tahunan ini tidak sekedar bersifat seremonial belaka, tetapi kita sebagai anggota DPRD maupun yang hadir disini dapat mengambil manfaat untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan kita terhadap beragam capaian dan hambatan serta harapan Presiden dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang diamanatkan konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlu kami informasikan bahwa sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, yang merupakan landasan strategis pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi Pembangunan dan acuan dalam penyusunan APBN, arah Pembangunan tahun 2027 dititikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan tersebut difokuskan pada Perogram Kerja Prioritas Nasional yang terdiri dari 8 (delapan) klaster dan 1 (satu) klaster pendukung yang mencakup 60 program kerja, sebagai berikut :

1. Kedaulatan Pangan dengan 9 program kerja;
2. Kemandirian energi dan air, 13 program kerja;
3. Pendidikan, 13 program kerja;
4. Kesehatan, 4 program kerja;
5. Hilirasasi dan industrialisasi, 5 program kerja;
6. Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, 5 program kerja;
7. Ekonomi kerakyatan dan desa, 2 program kerja;
8. Penurunan kemiskinan, 2 program kerja; dan 1 klaster pendukung adalah pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata Kelola, digitalisasi dan diplomasi ekonomi dengan 4 program kerja.

Hadirin rapat paripurna yang terhormat,

Selanjutnya marilah bersama kita ikuti Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Kepada petugas untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

=== MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN ===

✓ ***(Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya terlampir)***

Hadirin rapat paripurna yang terhormat,

Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden Republik Indonesia telah kita ikuti, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Hadirin rapat paripurna yang terhormat,

Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terimakasih kepada segenap undangan yang telah hadir mengikuti rapat, dan semoga rapat paripurna ini membawa manfaat bagi kita semua.

Sebelum rapat paripurna saya akhiri, besuk pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 kita akan merayakan sebuah momentum sejarah yang sangat penting, yaitu Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-81.

Sebagai penerus bangsa dan umat beragama marilah kita songsong dan maknai hari yang sangat penting itu dengan mengucap rasa syukur yang mendalam, atas segala rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kita meyakini bahwa kemerdekaan yang kita nikmati, selain hasil perjuangan kemerdekaan adalah atas rahmat dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

MERDEKA.....!!! MERDEKA.....!!! MERDEKA.... !!!

Akhirnya dengan mengucap " ***Alhamdulillahirobbil 'alamin*** " tepat pukul 16.36 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Sekian,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,

H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,

H. SULISTIYONO, AP.,M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2027 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG RAPBN 2027 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 14 AGUSTUS 2026
PUKUL : 13.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P	
1	2	3	4	5	
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1 ✓	L	
2	SUMARDI	Anggota	2	L	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	L	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	L	
5	H. SUPADI	Anggota	5	L	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	L	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	L	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8		P
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9 ✓	L	
10	ILYAS	Anggota	10	L	
11	SUPADI	Anggota	11	L	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	L	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	L	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	L	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	L	
16	ACHMAD LUTFY , S.T.	Anggota	16	L	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN				
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17 ✓	L	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	L	
19	NUR SAHID	Anggota	19	L	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	L	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	L	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	L	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23		P

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P	
1	2	3	4	5	
	FRAKSI DEMOKRAT				
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	L	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	L	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	L	
27	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	27	L	
28	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	28	L	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29	L	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	L	
31		Anggota	31	L	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA				
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	L	
33	KHAMID, S.E.,Sy.	Anggota	33	L	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	L	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	L	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	L	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37		P
38	ABSANTO	Anggota	38	L	
39	MARYONO	Anggota	39	L	
	FRAKSI HANURA AMANAH				
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	L	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	L	
42	RUMINI	Anggota	42		P
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	L	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	L	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	L	P

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,

.....

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG RAPBN 2027 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 14 AGUSTUS 2026

PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P	
1	2	3	4	5	
1	H. HARNO, S.E.	Bupati Rembang	1.	L	
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'.	Wakil Bupati Rembang	2.	L	
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.		
4	Ery Arvian B	Pengadilan Negeri Rembang	4.		
5	D JATI SUSANTO	Dandim 0720 Rembang	5.		
6	A. Tyas Widya. A	Kepolisian Resort Rembang	6.		
7	YUSUF EFENDI	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.		
8	Dr.FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	8.	L	

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

H. SULISTIYONO, AP.,M.SI.

NIP. 19730528 199311 1 002

DAFTAR HADIR OPD

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG RAPBN 2027 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 14 AGUSTUS 2026

PUKUL : 13.00 WIB

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P
1	2	3	4	5	6
1	STAF AHLI BUPATI	MUNTADLIN	Staf ahli	1	
2	STAF AHLI BUPATI	SUTRISNO	Sahli	2	
3	STAF AHLI BUPATI	SUDI SEKUTANTO	STAFI	3	
4	ASISTEN I SEKDA			4	
5	ASISTEN II SEKDA	Mardi	As Ekbang	5	
6	ASISTEN III SEKDA			6	
7	BAG. PEMERINTAHAN			7	
8	BAG. HUKUM			8	
9	BAG. PROKOPIMDA	Heru Sugito	Kabag.	9	
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Ang ow	Plt Kabag	10	
11	BAG. PEREKONOMIAN			11	
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			12	
13	BAG. ORGANISASI	Ali Samin	Kabag	13	
14	BAG. UMUM	Ang. Ow	Kabag Umum	14	
15	BAG. PBJ			15	
16	BPPKAD	Sri Nurjanti	Sekban	16	
17	INSPEKTORAT	Dra Analinya MM	Itorbbag	17	V
18	BAPPEDA	Rochmi	Sek. Bappeda	18	L
19	DINSOSPPKB			19	
20	B K D	Toni M	Sekretaris	20	
21	B P B D	Rijanto Sukoco		21	
22	DPU TATA RUANG	Maryoso	Sekretaris	22	
23	DINPERKIM	Mukhlis		23	
24	DINAS KESEHATAN	dr. Alwiyah	Sekretaris	24	
25	DINDIKPORA	Kholid P Aji	Kabid. SD	25	
26	DININDAGKOP & UMKM	Mahfudz	KADIS	26	
27	DINPERINNAKER	Fery Sunardi	Kadis	27	
28	DINTANPAN	Agus Iwan H	Kadis	28	
29	DINLUTKAN	Indah	Sekdin	29	
30	DINKOMINFO	Sukarminingsih	Sekdin	30	
31	DINAS PERHUBUNGAN	NURKHOLIS	Kadis	31	
32	DINAS DUKCAPIL	S. Patih K	Sekdin	32	
33	DINPERMADES	Slamet H	Plt Kadis	33	
34	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Isti	Plt Kadis	34	

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P
1	2	3	4	5	6
36	BADAN KESBANGPOL			36	
37	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN			37	
38	DINAS PMPTSP			38	
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39	
40	SATPOL PP			40	
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41	
42	P D A M			42	
43	ANEKA PERUSDA / PERCETAKAN DAERAH			43	
44	PD. BANK REMBANG			44	
45	BANK JATENG CAB. REMBANG			45	
46	PD BPR BKK REMBANG			46	
47	PD BPR BKK LASEM			47	
48	PT. R B S J			48	
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49	
50	KETUA KPU KAB. REMBANG			50	
51	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			51	
52	BAWASLU REMBANG			52	
53	BANK BRI CAB. REMBANG			53	
54	PLN REMBANG			54	
55	BPS REMBANG			55	
56	KANTOR BPN ATR REMBANG			56	
57	PMI CAB. REMBANG			57	
58	STIE. YPPI REMBANG			58	
59	PWRI REMBANG			59	
60	KANTOR POS CAB. REMBANG			60	
61	PT. PEGADAIAN REMBANG			61	
62	RUMAH TAHANAN			62	
63	PERHUTANI KPH MANTINGAN			63	
64	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			64	
65	KANTOR PERHUTANI SPH IV			65	
66	KANTOR POS DAN GIRO			66	
67	TELKOM REMBANG			67	
68	PLN CAB. REMBANG			68	
69	BAWASLU KAB. REMBANG			69	
70	B P N KAB. REMBANG			70	
71	KANTOR PAJAK			71	
72	UP3AD (ASET DAERAH)			72	
73	KANTOR PELABUHAN			73	
74	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			74	
75	DHARMA WANITA PERSATUAN			75	

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P
1	2	3	4	5	6
76	GERAKAN PRAMUKA			76	
77	PMI CAB. REMBANG			77	
78	STIE. YPPI REMBANG			78	
79	DPC PPP			79	
80	DPC PARTAI DEMOKRAT			80	
81	DPD PARTAI GOLKAR			81	
82	DPD PAN			82	
83	DPC PARTAI HANURA			83	
84	DPC PKS			84	
85	DPD PARTAI NASDEM			85	
86	DPC PARTAI GERINDRA			86	
87	DPC PKB	Fanna Irawan		87	
88	DPC PDI PERJUANGAN			88	
89	SUARA MERDEKA			89	
90	RADIO CBFM			90	
91	RADIO R2B			91	
92	RADIO MATA AIR			92	
93	Polres Rembang	ATYAS	wakapolres	93	
94	BAKESBANGPOL	ANDREAS	STAF	94	
95	Universitas Diponegoro	Sarah Stnagga	Mahasiswa	95	V
96	Universitas Diponegoro	Endjelia Missta	Mahasiswa.	96	V
97	Universitas Diponegoro	Nisa Alvo Sammito	Mahasiswa	97	
98	AL Sutrisna.	Kapolsek	Kapolsek	98	
99	Koramil 01/Rembang	Supariyanto	Danramil	99	
100	LEGOWATI / KEMENHAJ	LEGOWATI	Kasi Binapfaji	100	
101	UPPD/Samsat Rbg	Slamet G	Ka Sub bag TU	101	
102	Ardyanovem Putra P.	Ardyanovem P.P.	Mahasiswa	102	
103	Universitas Diponegoro	fatih aly V	mahasiswa	103	
104	DPC PKB Rembang	Fam		104	
105	IMAM FEBRIANTO SG.	IMAM FEBRIANTO		105	
106	Semen Gresik.	Bayuraga		106	
107	Universitas Terbuka	Syafiq Ahmad		107	
108	Universitas Terbuka	Novi Oktavriani		108	
109	Universitas terbuka	Sulistyowati		109	
110	Universitas terbuka	Eka Dewa Maulana		110	
111	Universitas Terbuka	Ahmad Nur Aini		111	
112	Universitas Terbuka	Rizal Fillah Yasara	Mahasiswa	112	
113	POLRES RBG.	Wahyu RW	POLRES	113	
114	Jasa Tirta	Budiarto	PSK Pdny	114	
115	Tirta	Leeksan	Kasdi	115	

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P
1	2	3	4	5	6
119	Dcds Rdata pas	Asst	Ka Kantor	119	
120	Rutan Rbg	Imam ~~SA~~	Kasubag.	120	
121	Sofia NUR UNDIP	Sofia Nur fiyanti	Cs/MM	121	
122	Undip	Salwa AM.	-	122	
123	Undip	Muallifah A.D	Mahasiswa	123	
124	Salut kartini (ut	Dian Arrizah	Mahasiswa	124	
125	Siti khosiatun Misa (UT)	Siti khosiatun Nisa	-	125	
126	~~na. M. khikam~~ Salut	khilcam	- -	126	
127	M. Fajar Amiruddin	Ajudan Bupati		127	
128	Anggita Abiranya	Ajudan Wabup		128	
129	Undip.	M. Haqqi. R.	Mahasiswa	129	
130	Bakesbangpol	Nur Candra	Pamong	130	
131	"	Cindy L.	"	131	
132	"	Andreas	"	132	
133	UNDIP	Dzulfikar F.	Mahasiswa	133	
134	Rsdm	Tegar K.		134	
135	POLRES	Suwarso	Satpam	135	
136	Sekda	AMIRUL	Protokol	136	
137				137	
138				138	
139				139	
140				140	
141				141	
142				142	
143				143	
144				144	
145				145	
146				146	
147				147	
148				148	
149				149	
150				150	
101				101	
102				102	
103				103	
104				104	
105				105	
106				106	
107				107	
108				108	
109				109	
110				110	

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P	
1	2	3	4	5	6	
111				111		
112				112		
113				113		
114				114		
115				115		
116				116		
117				117		
118				118		
119				119		
120				120		
121				121		
122				122		
123				123		
124				124		
125				125		
126				126		
127				127		
128				128		
129				129		
130				130		
131				131		
132				132		
133				133		
134				134		
135				135		
136				136		
137				137		
138				138		
139				139		
140				140		
141				141		
142				142		
143				143		
144				144		
145				145		
146				146		
147				147		
148				148		

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P
1	2	3	4	5	6
151	A. ROUF	CAMAT	CAMAT	151	
152				152	
153				153	
154				154	
155				155	
156				156	
157				157	
158				158	
159				159	
160				160	
161				161	
162				162	
163				163	
164				164	
165				165	
166				166	
167				167	
168				168	
169				169	
170				170	
171				171	
172				172	
173				173	
174				174	
175				175	
176				176	
177				177	
178				178	
179				179	
180				180	
181				181	
182				182	
183				183	
184				184	
185				185	
186				186	
187				187	

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	L / P	
1	2	3	4	5	6	
191				191		
192				192		
193				193		
194				194		
195				195		
196				196		
197				197		
198				198		
199				199		
200				200		

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

H. SULISTIYONO, AP.,M.SI.
NIP. 19730528 199311 1 002

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR
ATAS RANCANGAN UNDANG–UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
TAHUN ANGGARAN 2027 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati,

Serta hadirin sekalian yang berbahagia, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.

Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat pengabdian.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pertama saya menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI atas kerja sama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN.

APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. Alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya.

Negara hadir ketika petani membutuhkan pupuk. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat menyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya.

Negara hadir ketika anak membutuhkan makanan bergizi dan sekolah yang baik. Negara hadir ketika keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit.

Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat, di ruang kelas anak-anak kita, di Puskesmas dan rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia.

Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan: setiap Rupiah yang dikumpulkan negara harus kembali menjadi harapan bagi rakyat.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak mudah. Harga energi meningkat, suku bunga global tinggi, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia.

Namun, di tengah tekanan tersebut, perekonomian Indonesia tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat.

Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja negara tumbuh kuat 18,2 persen. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi.

Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal.

Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Dunia melihat sikap kita. Pada 13 Juli 2026, Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Indonesia tetap berada pada kategori investment grade.

S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara.

Mereka juga menilai bahwa upaya Pemerintah memusatkan pengelolaan dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor.

Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam memberantas praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating juga memberikan rating AAA/Stable yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds Republik Indonesia.

Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali.

Kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027.

Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong "Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat".

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus semakin solid;

Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat;

Program-program unggulan harus berjalan efektif;

Program perlindungan sosial harus andal;

Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan;

Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat;

Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin kokoh.

Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakan tanpa pandang bulu.

RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN, yaitu: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun Rupiah, naik dari 3.842,7 triliun Rupiah di APBN 2026.

Pendapatan Negara diperkirakan mencapai 3.426,0 triliun Rupiah, naik dari 3.153,6 triliun Rupiah di APBN 2026.

Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu 689,1 triliun Rupiah, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Inflasi akan dijaga pada 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat.

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen, turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026.

Rasio Gini ditargetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380, dan Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575.

Angka-angka tersebut akan kita jaga dengan reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan.

Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.

Saudara-saudara sekalian,

Angka angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makro ekonomi kita. Angka-angka makro ekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita.

Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita.

Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa kita, perlu kita pastikan berhasil.

Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya.

Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.

Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran.

Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun Rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Jika ternyata PDB kita lebih besar, maka defisit kita lebih kecil.

Selain itu, pembaharuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu sensus ekonomi ini sangat penting.

Saudara-saudara sekalian,

Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.

Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri.

Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah.

Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara.

Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen pada 2026.

Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan 1.200 triliun Rupiah. Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar 360 triliun Rupiah. Ini bukan angka yang kecil.

Karena itu Pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.

Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan Pemerintah akan dilakukan secara digital, serta semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri.

Setiap Rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang kelas tambahan yang dapat diperbaiki, Puskesmas tambahan yang dapat direnovasi, rumah sakit tambahan yang dapat dibangun, dan kehidupan rakyat yang dapat ditingkatkan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di Majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya sepuluh langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia.

***Pertama,** kita akan memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia.*

Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas adalah pintu pertama negara ketika rakyat sakit.

Di sanalah ibu memeriksakan kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, dan penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat.

Mulai tahun 2027, Pemerintah akan merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar Rupiah.

Selain itu kita juga akan merenovasi atau membangun 514 lab kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030.

Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup.

***Kedua,** kita akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah.*

Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang mampu menyelamatkan rakyat.

Sebagai langkah awal, kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 dari 66 rumah sakit umum daerah yang kita bangun sejak 2025 telah beroperasi.

Kita telah membawa alat pemeriksaan jantung, CT Scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh.

Tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang baik.

RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi: kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar.

Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah laporkan ke Majelis ini, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum, dan dokter spesialis kita.

Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 Kabupaten / Kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. 481 Kabupaten / Kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit.

***Ketiga,** kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029.*

Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak Indonesia belajar di sekolah yang aman dan bermartabat.

Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya. Tetapi masih ada anak yang belajar dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan ruang kelas yang tidak aman.

Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028, dan harus selesai paling lambat tahun 2029.

Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun.

Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, dan layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak.

Selain itu, semua ruang kelas juga akan dilengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026 ini, semua sekolah akan menerima tambahan 3 IFP. Karena tahun lalu sudah terima 1, artinya akhir tahun ini semua sekolah yang punya 4 ruang atau lebih akan punya 4 IFP.

IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan ada long distance learning. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta untuk semua ruang kelas di Indonesia.

Untuk memperkuat lompatan kita di bidang pendidikan, Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Itu adalah cita-cita dan target kita.

***Keempat,** hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita akan segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.*

Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya.

Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri.

Kita menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya. Kita menanggung biaya produksinya, pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya. Padahal mereka tidak punya komoditas tersebut.

Keadaan ini harus berani kita ubah. Karena itu, Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027.

Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia.

Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit.

Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain.

Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia.

***Kelima,** kita akan percepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara.*

BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik. Sebagian belum menghasilkan manfaat yang sebanding dengan nilainya.

Sebagaimana saya laporkan ke Majelis ini tadi pagi, kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif.

Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi.

Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara.

Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru.

***Keenam,** kita telah mulai dan akan bangun 100.000 Mega Watt, atau 100 Giga Watt Energi Surya.*

Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya.

Tahun ini, kita akan bangun 30 Giga Watt pembangkit listrik tenaga surya dan hentikan 13 Giga Watt pembangkit listrik tenaga diesel.

Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik.

Dengan PLTS kita juga bisa bangun kemandirian energi tingkat desa. Idealnya, setiap desa ada PLTS 1 Mega Watt.

Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya 73,9 triliun Rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita.

Matahari Indonesia tidak boleh terbuang. Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa harus kita manfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

***Ketujuh,** hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII.*

Kita telah tentukan lokasi PFII di Jakarta, dan juga di Bali.

PFII ini akan menjadi wajah baru Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII.

Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat diadopsi.

Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi.

PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif.

Pada saat yang sama, aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap ditegakkan.

Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia.

Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai.

***Kedelapan**, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF.*

Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang.

DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi bangsa, tetapi belum dapat dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek.

Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional pada proyek mobil nasional, proyek motor nasional, proyek Giant Sea Wall, dan proyek-proyek transformasional lain yang dibutuhkan bangsa.

Kita harus belajar dari Belanda. Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant Sea Wall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda.

Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura. Selain itu, Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus jadi infrastruktur air, jalur pertumbuhan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa.

Mungkin akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita menyelesaikan pembangunan Giant Sea Wall, tapi kita harus mulai. Pembangunan ini kita bagi ke 15 segmen, dan jika dilaksanakan serentak bisa 8 tahun selesai.

***Kesembilan**, kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat.*

Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional.

Selain itu, hari ini kita umumkan, kita akan berikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia.

Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya.

Insentif ini adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak Indonesia.

Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus: penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa.

***Kesepuluh,** hari ini kita umumkan kebijakan dwi-kewarganegaraan bagi talenta istimewa Indonesia.*

Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, dan profesional kelas dunia.

Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri.

Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan untuk berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air.

Hari ini Pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi warga negara Indonesia yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional.

Kebijakan ini akan dirancang selektif dan terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Seluruh kebijakan yang kami putuskan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.

Renovasi 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD, dan perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat.

Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan harga. Optimalisasi aset BUMN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia Financial Center atau PFII akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi.

Subsidi motor listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik diaspora kita.

Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian, dan nyata dalam kehidupan rakyat.

Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda ini bersama-sama.

Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaatnya. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi.

Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban.

Untuk itu, saya juga mengajak kita semua untuk terus menerus koreksi diri dan terus menerus lebih disiplin.

Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat. Mengabdi kepada bangsa. Memberikan solusi pada kesulitan-kesulitan rakyat.

Tugas Pemerintah yang paling utama adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman bahaya. Ancaman kemiskinan. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja. Dan berbagai ancaman lainnya.

Pemerintah di semua tingkatan harus hilangkan praktek-praktek korupsi, penipuan, dan mark up. Penggelembungan lebih dari 3% menurut saya sudah masuk ke penipuan.

Pemerintah di semua tingkatan harus lebih efisien. Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Jangan pernah ada lagi proyek-proyek untuk menarik dana. Setiap proyek harus tingkatkan produktivitas rakyat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara konstruktif, terbuka, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Sekali merdeka, tetap merdeka! Sekali berdaulat, harus berdaulat selamanya!

Merdeka!

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.